



HC.04.01/291

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 182 / M.PPN /09/ 2004**

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI *GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND
REVENUE ADMINISTRATION PROJECT*
DENGAN BANK DUNIA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Keuangan Negara dan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah bermaksud untuk mempercepat pelaksanaan reformasi di bidang (i) pengelolaan Keuangan Negara dengan mempersiapkan dan melaksanakan penyempurnaan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, standar akuntansi pemerintahan, pengadaan, dan penelitian kebijakan, (ii) Pendapatan Negara dengan mempersiapkan dan melaksanakan penyempurnaan administrasi pendapatan negara di kepabeanaan, (iii) Tata Pemerintahan dan Akuntabilitas dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas instansi-instansi yang berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan dan peradilan yaitu DPR, Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan Pengadilan Persengketaan Pajak;
- b. bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri dalam bentuk Adaptable Program Loan (APL) dibutuhkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara dan administrasi pendapatan;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diperlukan delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan Bank Dunia dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
 - 2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND REVENUE ADMINISTRATION PROJECT* DENGAN BANK DUNIA

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Government Financial Management and Revenue Administration Project* dengan Bank Dunia pada tanggal 29 – 30 September 2004 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

PERTAMA:...

- KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi Government Financial Management and Revenue Administration Project dengan Bank Dunia tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi Government Financial Management and Revenue Administration Project dengan Bank Dunia tersebut dibebankan kepada Anggaran masing-masing instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 September 2004

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


KWIK-KIAN GIE

Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENEG. PPN/KEPALA BAPPENAS
 NOMOR : KEP. 182 /M.PPN/09/2004
 TANGGAL : 28 September 2004

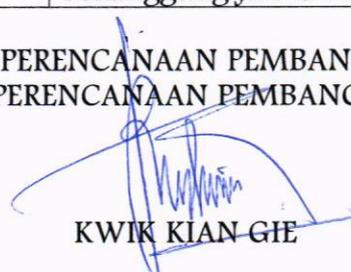
SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM NEGOSIASI GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT AND
 REVENUEADMINISTRATION PROJECT

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
I	Tim Perunding		
1.	Mulia P.Nasution	Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu	Ketua
2.	Prasetijono Widjojo	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas	Wakil Ketua
3.	Achmad Rochjadi	Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu	Anggota
4.	Soekarno Wirokartono	Deputi Bidang ekonomi, Bappenas	Anggota
5.	Anggito Abimanyu	Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, Depkeu	Anggota
6.	Eddy Abdurachman	Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu	Anggota
7.	Agus Muhammad	Inspektur Jenderal Depkeu	Anggota
8.	Sarojo Atmosudarmo	Wakil Ketua Pengadilan Pajak, Depkeu	Anggota
9.	I Gusti Ayu Darsini	Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI	Anggota
10.	Delthy Sugriady Simatupang	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas	Anggota
11.	I Made Gede Erata	Staf Ahli Menkeu Bidang Penerimaan Negara, Depkeu	Anggota
12.	Wismana Adi Suryabrata	Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Bappenas	Anggota
13.	Slamet Seno Aji	Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas	Anggota
14.	Agus Rahardjo	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas	Anggota
15.	Dida Heryadi Salya	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas	Anggota

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
16.	Paruli Lubis	Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Depkeu	Anggota
17.	Dharma Bakti	Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu	Anggota
18.	Bambang Djasminto	Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu	Anggota
19.	Abdul Kadir Sumarsono	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Depkeu	Anggota
II	Tim Teknis		
1.	Paruli Lubis	Direktur Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu selaku Ketua Tim Kerja GFMRAP	Ketua
2.	Slamet Seno Adji	Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas selaku Penanggung Jawab Sub Komponen Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, GFMRAP	Wakil Ketua
3.	Agus Raharjo	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas selaku Penanggung Jawab Sub Komponen Reformasi Pengadaan, GFMRAP.	Anggota
4	Heru Subiyantoro	Kepala Pusat Analisa Statistik, BAPEKKI, Depkeu selaku Penanggung Jawab Sub Komponen Peningkatan Kapasitas Penelitian Kebijakan, GFMRAP	Anggota
5.	Robert Pakpahan	Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi – DJP selaku Penanggung Jawab sub Komponen Penyempurnaan Administrasi Perpajakan, GFMRAP	Anggota
6.	Heri Kristiono	Kasubdit Kerjasama Internasional III DJBC selaku Ketua Tim Reformasi DJBC dan Penanggung Jawab Sub Komponen Penyempurnaan Kepabeanan, GFMRAP	Anggota

No.	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
7	Winantuningtyastiti Swasanani	Kepala Biro Perencanaan dan Pengendalian, Sekretariat Jenderal DPR-RI selaku Penanggung Jawab Sub Komponen Peningkatan Kapasitas Badan Legislatif, GFMRAP	Anggota
8.	Oni Syahroni Priatna	Inspektur Bidang II, Inspektorat Jenderal Depkeu selaku Penanggung Jawab Sub Komponen Pengawasan Internal, GFMRAP	Anggota
9.	Ahmad Suhari	Sekretaris Pengadilan Pajak, Setjen Depkeu selaku Penanggung Jawab, sub Komponen Penyelesaian Sengketa Pajak, GFMRAP	Anggota
10.	Ardi Prabowo	Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Depkeu	Anggota
11.	Suharmen	Kasubdit Keuangan Negara, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Bappenas	Anggota
12.	Obrian Saragih	Kasubdit. Multilateral I, Direktorat Pendanaan Multilateral, Bappenas	Anggota
13.	Sumaryandono	Kasubdit. Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan, Direktorat Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan, Bappenas	Anggota
14.	Muhammad Nasir	Kepala Bagian Organisasi, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Bappenas	Anggota
15	Indrajit Kertoredjo	Kepala Seksi Pinjaman Luar Negeri, Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan	Anggota
16.	Hermani Noor	Kasubdit. PHLN I, Depkeu	Anggota
17.	Fitri Harto	Kasubdit PHLN II, Depkeu	Anggota
18.	Sudiro	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan Keuangan, Depkeu	Anggota
19.	Sugeng Wardoyo	Kasubag Hukum Perjanjian	Anggota
20.	Sri Hartati	Ketua Tim Procurement, GFMRAP	Anggota
21.	Moh. Hatta	Pemimpin Proyek GFMRAP selaku Penanggung Jawab PSSU	Anggota

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


KWIK KIAN GIE